

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu negara maritim terbesar dunia, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal tersebut merupakan modal dasar yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil dan makmur serta sebagai sebuah bangsa yang tangguh dalam hal politik, keamanan sosial, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**, serta mendukung pencapaian delapan Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

Pencapaian Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah keniscayaan apabila menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai episentrum pembangunan nasional, mengingat potensi sumber daya perairan yang sangat besar. Orientasi pembangunan sudah semestinya beralih ke sektor kelautan dan perikanan dengan menjadikan sektor ini sebagai poros penggerak pembangunan dan perekonomian nasional, transformasi pendekatan pembangunan yang sebelumnya hanya berorientasi pada peningkatan produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta berorientasi pada

permintaan pasar yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Transformasi pendekatan diimplementasikan ke dalam lima arah kebijakan pembangunan Ekonomi Biru yaitu:

- 1) Memperluas kawasan konservasi laut;
- 2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;**
- 3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Salah satu program prioritas KKP yang dimandatkan pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem perairan dan juga dalam hal peningkatan ekonomi di sektor kelautan dengan cara memaksimalkan potensi perikanan nasional dan terus meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan. PIT memastikan aktivitas penangkapan ikan tidak melebihi maksimum potensi lestari (*Maximum Sustainable Yield*) yang diukur berdasarkan status penangkapan per wilayah. Diharapkan dengan adanya PIT maka sumber daya ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Berbagai akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

B. Kondisi Umum

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memulai proses transformasi pembangunan kelautan dan perikanan sejak periode tahun 2020-2024 melalui arah kebijakan pembangunan Ekonomi Biru. Periode transisi rencana pembangunan jangka menengah dari periode 2020-2024 ke periode 2025-2029 merupakan dokumen yang digunakan untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya, termasuk capaian keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan program. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi program/kegiatan yang memerlukan perbaikan dan inovasi pada kebijakan mendatang. Capaian pembangunan perikanan tangkap direfleksikan melalui capaian kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto Perikanan

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Pada tahun 2020, realisasi produksi perikanan berada pada titik terendah yang hanya tercapai sebesar 0,73%, sangat jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 7,9%. Realisasi yang rendah tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 sebagaimana dilaporkan oleh BPS (2021) dan FAO (2021). Pembatasan mobilitas, pembekuan ekspor, serta minimnya kegiatan di pelabuhan turut memperburuk kinerja produksi perikanan. Produksi membaik pada tahun 2021 dengan realisasi pertumbuhan PDB sebesar 5,45%, meskipun target tahunan berada pada angka 8,11%. Hal tersebut disebabkan oleh ekonomi yang semakin pulih serta intervensi pemerintah berupa stimulus yang tepat sasaran telah merangsang

ekonomi pulih (KKP, 2022; World Bank, 2022). Namun, pada tahun 2022, realisasi pertumbuhan PDB kembali turun ke level 2,79%, dari target sebesar 4%. Penurunan ini diakibatkan oleh kondisi cuaca ekstrem yang berdampak pada menurunnya hasil tangkapan dan distribusi ikan di wilayah pesisir BPS (2023).

Tahun 2023 menjadi titik balik dengan pertumbuhan yang kembali menguat ke angka 5,49%, melebihi target yang dipatok sebesar 4%. Memasuki tahun 2024, pertumbuhan PDB perikanan baru mencapai 0,68%, jauh di bawah target sebesar 5,0%. Beberapa faktor penyebabnya adalah cuaca ekstrem, banjir di sentra-sentra produksi seperti Sumatera Utara, Jambi, dan wilayah Pantura (KKP, 2024; BMKG, 2024).



Gambar 1. Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2019-2024 (%)

Sumber: BPS, 2024

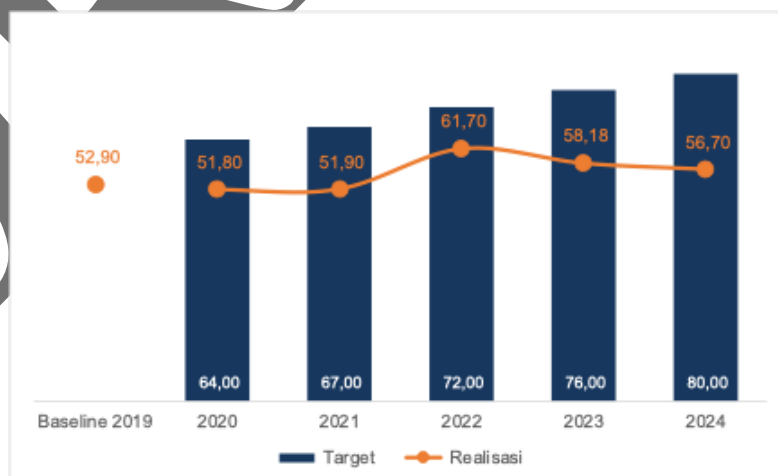
2. Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Dalam rangka mendukung target pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), yang diukur melalui capaian indikator proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu melalui kegiatan kapal perikanan yang menerapkan *logbook* penangkapan ikan, kapal perikanan yang dipantau oleh *observer* dan penghitungan alokasi sumber daya ikan dengan 2 kegiatan

utama yaitu, *Logbook* Penangkapan Ikan (LBPI) dan pemantau kapal penangkap ikan serta kapal pengangkut ikan (*Observer*).

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, perlu adanya pengendalian penangkapan ikan melalui penerapan kuota usaha penangkapan ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) serta evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan. Indikator pengendalian dihitung berdasarkan rasio antara volume produksi tangkapan laut pada satu tahun berjalan (tidak termasuk tuna, cakalang, dan kekerangan) dengan estimasi potensi sumber daya ikan sebagaimana tercantum dalam regulasi tersebut.

Selama kurun waktu 2020-2024, pemerintah dapat menjaga proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman meskipun terjadi peningkatan persentase proporsi tangkapan pada tahun 2022 dan 2023, namun realisasi tersebut masih dibawah angka batasan proporsi tangkapan yang aman yaitu kurang dari sama dengan 80%.



Gambar 2. Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: KKP, 2024

Keberhasilan pencapaian proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%) didukung dengan pelaksanaan kegiatan diantaranya: 1) Kegiatan pendataan berbasis daerah penangkapan melalui pelaporan LBPI yang dirancang secara akurat pada setiap *trip* di WPPNRI guna memberikan gambaran tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI; 2) Pengumpulan data dan verifikasi data LBPI dilakukan dengan menggunakan elektronik LBPI yang dirangkum dalam aplikasi SILOPI (Sistem Informasi *Logbook* Penangkapan Ikan); 3) Penempatan tenaga *observer* di kapal perikanan untuk menjamin ketersediaan data sebagai data pembanding. LBPI juga menjadi sarana validasi data yang memberikan informasi data biologis ikan.

3. Volume Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan dihitung berdasarkan total volume hasil perikanan tangkap yang tercatat dari seluruh kabupaten/kota. Produksi perikanan tangkap meliputi perairan umum dan daratan.

Perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran yang penting terhadap produksi perikanan tangkap dunia. Hal tersebut tercantum pada laporan FAO (2022), yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kontributor kedua terbesar setelah China dengan produksi hasil tangkapan sebesar 7% terhadap total tangkapan dunia, dan 8,2% dari total tangkapan laut. Capaian kinerja Subsektor Perikanan Tangkap menunjukkan kinerja yang melampaui target dengan realisasi sebesar 7,39 juta ton dari target 6 juta ton atau mencapai 123,21%.

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024*
Perikanan Tangkap	6.989.090	7.224.501	7.489.395	8.178.309	7.392.838
Perikanan Tangkap-Laut	6.494.140	6.767.565	7.026.426	7.706.223	6.924.277
Udang	206.765	247.502	250.981	274.384	280.698
Tuna	300.803	359.132	355.351	355.966	339.193
Cakalang	468.269	432.845	474.810	458.899	521.403
Tongkol	581.074	593.906	660.476	761.340	642.356
Lainnya	4.937.229	5.134.180	5.284.808	5.855.634	5.140.626
Perikanan Tangkap-Umum	494.950	456.936	462.970	472.086	468.561
Udang	18.900	17.180	17.321	14.535	19.299
Ikan	476.050	435.758	441.534	452.072	444.793
Lainnya		3.998	4.115	5.479	4.470

Tabel 1. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 (Ton)

*capaian s.d Triwulan IV 2024

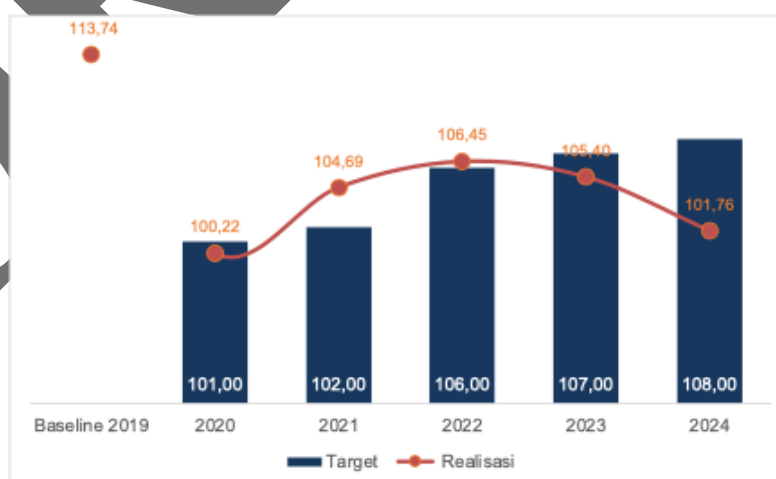
Sumber: KKP, 2024

Pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap Tahun 2020-2024 sebesar 3,02% dengan perincian pertumbuhan perikanan tangkap sebesar 1,51% dimana perikanan tangkap laut tumbuh sebesar 1,72% dan perairan darat tumbuh melambat sebesar 1,28%. Produksi perikanan tangkap Tahun 2024 mengalami penurunan dari Tahun 2023 disebabkan kondisi cuaca ekstrem seperti badai, gelombang tinggi yang mengganggu aktivitas penangkapan ikan, merusak kapal dan mengurangi hasil tangkapan.

Beberapa upaya pemerintah dalam pengelolaan perikanan adalah dengan menetapkan program prioritas terutama berkaitan dengan pengelolaan laut untuk mendukung aktivitas produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan yaitu program penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pembangunan .

4. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap. NTN diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima nelayan (It) dengan harga yang dibayarkan nelayan (Ib). Perhitungan NTN dilakukan dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.



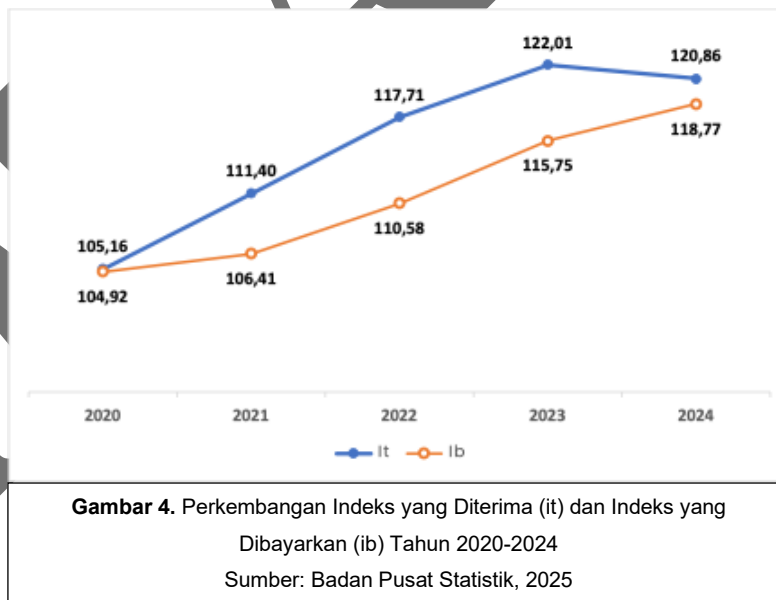
Keterangan:

- Perhitungan NTN Tahun 2019 menggunakan tahun dasar Tahun 2012
- Perhitungan NTN Tahun 2020-2024 menggunakan tahun dasar Tahun 2018

Gambar 3. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Realisasi NTN selama 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren yang fluktuatif meskipun target tahunan yang ditetapkan selalu meningkat. Capaian indikator kinerja NTN selama tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,42% dengan nilai NTN yang mengalami kenaikan dari 100,22 di tahun 2020 menjadi 101,76 di tahun 2024. Puncak pencapaian NTN tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi capaian sebesar 106,45 dimana angka tersebut berada di atas target sebesar 106,00 dan menjadi tahun dengan NTN tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kenaikan tersebut disebabkan oleh jumlah tangkapan yang meningkat, harga pasar yang tinggi, serta adanya subsidi BBM yang diberlakukan oleh pemerintah sehingga menekan biaya produksi nelayan. Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan realisasi yang tajam meskipun dengan angka yang masih berada di atas 100. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya surplus atau peningkatan kesejahteraan nelayan meskipun angka tersebut belum optimal sebab peningkatan yang tidak signifikan dan tidak mencapai target akhir yang ditetapkan.



Adapun penurunan tajam di tahun 2024 menunjukkan adanya tantangan besar yang dihadapi sektor perikanan, baik dari sisi produksi maupun daya beli nelayan. Jika ditinjau dari grafik perkembangan indeksnya, penurunan indeks yang diterima (It) dan peningkatan indeks yang dibayarkan (Ib) dengan selisih yang mengecil di tahun 2024

menandakan terjadi penurunan daya beli atau margin keuntungan nelayan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan kesejahteraan nelayan di masa depan, terutama jika tren kenaikan biaya produksi terus berlanjut tanpa diimbangi peningkatan harga jual hasil tangkapan atau efisiensi usaha perikanan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target NTN diantaranya:

1. Stagnasi pada Sisi Penerimaan Nelayan (Indeks Harga Diterima - It)

Meskipun harga ikan di tingkat konsumen naik, harga yang diterima oleh nelayan di hulu seringkali tidak meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. Ikan hasil tangkapan nelayan harus melewati beberapa lapisan perantara (tengkulak, bakul, pelelang, pedagang besar) sebelum sampai ke konsumen akhir. Setiap lapisan mengambil margin keuntungan, sehingga harga di tingkat nelayan tetap rendah. Nelayan seringkali tidak memiliki kekuatan tawar (*bargaining power*) yang cukup dalam struktur pasar ini.

Selain itu, ketika terjadi panen raya pada jenis ikan tertentu, harga di tingkat nelayan justru anjlok karena pasokan melimpah yang tidak diimbangi oleh kapasitas penyerapan pasar dan fasilitas penyimpanan (*cold storage*) yang memadai. Keterbatasan akses nelayan terhadap es dan fasilitas rantai dingin (*cold chain*) di atas kapal dan di pelabuhan pendaratan ikan menyebabkan kualitas ikan cepat menurun. Ikan dengan kualitas lebih rendah akan dihargai lebih murah sehingga turut mempengaruhi indeks harga yang diterima oleh nelayan.

2. Eskalasi pada Sisi Pengeluaran Nelayan (Indeks Harga Dibayar - Ib)

Indeks Harga Dibayar adalah faktor yang paling menekan NTN. Kenaikan biaya yang harus ditanggung nelayan jauh lebih cepat daripada kenaikan pendapatan mereka. Komponen utamanya adalah:

a. Biaya Produksi (Melaut) yang Sangat Tinggi

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komponen biaya terbesar dalam operasional penangkapan ikan, bisa mencapai 40-60% dari total biaya. Kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, secara langsung melambungkan biaya operasional. Selain itu, kelangkaan atau kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi seringkali memaksa nelayan membeli BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Selain BBM yang terus melonjak, harga perlengkapan melaut seperti jaring, mesin kapal, suku cadang, dan es balok juga terus mengalami kenaikan.

b. Inflasi Kebutuhan Rumah Tangga

Kenaikan harga kebutuhan pokok secara umum (inflasi), seperti beras, minyak goreng, telur, biaya pendidikan, dan kesehatan, secara signifikan meningkatkan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) oleh nelayan yang juga membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini membuat surplus pendapatan yang mungkin didapat dari hasil melaut menjadi tergerus untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

C. Potensi dan Permasalahan

Potensi pengembangan perikanan tangkap di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa potensi utama yakni sebagai berikut:

1. Sumber Daya Perikanan yang Melimpah

Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya perikanan yang sangat melimpah, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kontribusi signifikan terhadap produksi perikanan dunia. Potensi ini tercermin dalam volume produksi perikanan nasional di tingkat global. Berdasarkan data FAO (2024), Indonesia menempati peringkat kedua sebagai produsen perikanan dunia setelah Tiongkok, dengan volume produksi ikan dan rumput laut di tahun 2022 mencapai 22,2 juta ton,

berkontribusi sekitar 10% dari total produksi perikanan dunia sebesar 221,9 juta ton.

Di sektor perikanan tangkap, Indonesia juga menempati posisi kedua setelah Tiongkok, dengan volume produksi mencapai 7,5 juta ton atau 8,2% dari total produksi perikanan tangkap dunia pada tahun 2022. Capaian tersebut masih dapat ditingkatkan mengingat potensi yang dimiliki. Berdasarkan hasil kajian, Indonesia memiliki stok sumber daya ikan lestari mencapai 12,01 juta ton per tahun, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Tuna, Tongkol, Cakalang, Udang, Cumi-Cumi, Sotong, dan Gurita menjadi komoditas unggulan Indonesia yang sangat dibutuhkan bagi industri pengolahan sebagai komoditas ekspor. Tidak hanya itu, komoditas lainnya seperti ikan pelagis seperti Layang, Kembung, Lemuru, Kakap Selar, dan Teri merupakan penopang utama konsumsi domestik dan industri pengolahan ikan dalam negeri. Selain potensi sumber daya ikan di perairan laut, terdapat potensi perairan darat. Sejauh ini, perikanan tangkap untuk perairan darat di Indonesia sudah berperan sebagai sumber mata pencaharian (livelihood). Selanjutnya, dari produksi perikananannya, maka perairan darat juga memiliki peran dalam menjaga kelangsungan suplai protein hewani bagi masyarakat lokal (food security) dan bahan baku industri kecil pengolahan hasil perikan. Berdasarkan *Article 7 FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries* dijelaskan bahwa pengelolaan perikanan di perairan darat terdiri dari tiga komponen, meliputi : 1) pengelolaan kegiatan perikanan yaitu upaya yang terkait dengan pengaturan kegiatan penangkapan serta aspek sosial ekonominya seperti perizinan, pengaturan alat tangkap, pengaturan musim, dll. Kebijakan pengelolaan yang diambil umumnya bertujuan untuk membatasi akses penangkapan untuk menghindari upaya penangkapan yang berlebih serta membatasi penggunaan alat tangkap yang merusak; 2) pengelolaan stok ikan mengendalikan ukuran populasi ikan diantaranya melalui penebaran,

introduksi spesies baru atau langkah pengkayaan lain yang dianggap tepat; serta 3) pengelolaan lingkungan perairan yaitu menjaga kesesuaian habitat agar tetap sesuai dengan kebutuhan ikan serta upaya peningkatan kapasitas fisik lingkungan dalam mendukung kehidupan ikan salah satu diantaranya dengan pengembangan suaka ikan. Pada beberapa lokasi percontohan telah dibentuk Sekretariat Pengelolaan, pengembangan TPI perairan darat, serta penebaran benih ikan endemik.

2. Instrumen pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI

Telah dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI, antara lain:

- 1) Tersusunnya Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP);
- 2) Ditetapkannya Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP); dan
- 3) Ditetapkannya mekanisme pengaturan lainnya.

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia.

1. Struktur Usaha Kelautan dan Perikanan yang Didominasi Skala Kecil dengan Penggunaan Teknologi yang Masih Tradisional

Meskipun sektor kelautan dan perikanan Indonesia memiliki potensi besar, namun masih didominasi oleh struktur usaha skala kecil. Dominasi struktur usaha ini menjadi permasalahan fundamental pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Sebagian besar pelaku usaha sektor perikanan tangkap beroperasi dalam skala mikro atau kecil, dengan modal terbatas, teknologi sederhana, dan jangkauan pasar yang terbatas. Sebagian besar nelayan masih menggunakan alat tangkap dan teknologi tradisional yang kurang efisien serta belum optimalnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan, termasuk masih minimnya pengetahuan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan bagi sebagian nelayan. Berdasarkan data,

diketahui bahwa armada kapal penangkap ikan Indonesia terdiri dari 1.137.734 kapal, di mana kapal kecil (<10 GT) mewakili hampir 95% dari total armada, dengan 15% dari total armada merupakan perahu tanpa motor (KKP, 2025).

2. Tingginya Biaya Produksi

Tingginya biaya produksi merupakan salah satu kendala utama yang membayangi sektor perikanan di Indonesia. Permasalahan ini secara langsung mempengaruhi profitabilitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha para pelaku perikanan, terutama yang berskala kecil.

Di bidang perikanan tangkap, nelayan dihadapkan dengan biaya operasional melaut yang tinggi. 60-70% dari total biaya operasional melaut merupakan modal bahan bakar. Keterbatasan akses pada BBM bersubsidi mengakibatkan biaya operasional melaut membengkak. Kondisi ini diperparah dengan inflasi yang terjadi yang mengakibatkan naiknya harga bahan pokok seperti kenaikan harga beras, minyak, dan bahan pokok lainnya yang dibutuhkan untuk aktivitas melaut.

3. Sarana prasarana usaha penangkapan ikan

Pengembangan infrastruktur dan integrasi konektivitas sistem informasi antar pelabuhan perikanan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada masih rendahnya produktivitas armada perikanan, terutama dalam pemenuhan standar laik tangkap dan laik simpan, serta rendahnya kualitas dan akurasi pendataan kapal dan alat penangkapan ikan. Selain itu, adopsi teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien masih terbatas. Tantangan ini diperkuat oleh belum terbangunnya konektivitas pemanfaatan usaha secara menyeluruh, khususnya pada skala nelayan kecil, belum terintegrasinya sistem perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, serta masih minimnya pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pelaporan dan pengelolaan usaha penangkapan ikan.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya. Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasikan ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah perumusan alternatif arah kebijakan.

Tabel 2. SWOT Lingkup DJPT

Pengelolaan Sumber Daya Ikan			
Strengths (S)	Weaknesses (W)	Opportunities (O)	Threats (T)
• Tersedianya data potensi sumber daya ikan hasil riset nasional sebagai dasar pengelolaan • Implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya • Skema PNBP pascaproduksi mendukung optimalisasi penerimaan negara secara berkeadilan	• Belum optimalnya sistem pemantauan dan pengawasan secara daring (<i>real-time</i>) • Keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan SDM pengawas perikanan • Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan zonasi dan kuota tangkap • Belum terintegrasinya data SDI antar lembaga secara	• Pemanfaatan teknologi pemantauan modern seperti satelit pengawasan perikanan • Peluang dukungan pendanaan internasional untuk program konservasi dan penguatan tata kelola SDI • Peningkatan kolaborasi riset dengan lembaga akademik dan mitra pembangunan • Peningkatan	• Potensi kelebihan tangkap (<i>overfishing</i>) • Dampak perubahan iklim terhadap distribusi dan ketersediaan ikan • Pencemaran laut dari aktivitas industri, limbah rumah tangga, dan pertambangan • Masih maraknya praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) • Degradasi

• Penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sebagai basis pengelolaan berbasis wilayah • Tersedianya regulasi teknis yang mengatur konservasi dan perlindungan SDI	menyeluruh • Tantangan dalam akurasi dan konsistensi pelaporan data hasil tangkapan	kesadaran publik terhadap keberlanjutan sumber daya laut • Penerapan sistem penilaian stok secara periodik sebagai dasar pengaturan kuota	ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove
--	--	--	---

Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Strengths (S)	Weaknesses (W)	Opportunities (O)	Threats (T)
• Sistem perizinan kapal perikanan telah terintegrasi • Pemanfaatan teknologi pemantauan seperti VMS dan e-logbook untuk kapal ukuran besar • Tersedianya standar nasional untuk spesifikasi alat penangkapan ikan • Penerapan persyaratan laik tangkap dan laik simpan meningkatkan aspek keselamatan dan	• Tingkat kepatuhan terhadap pelaporan masih rendah • Banyak kapal perikanan kecil belum teregistrasi dalam sistem nasional • Sebagian besar kapal belum memenuhi standar keselamatan pelayaran • Masih terdapat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan • Terbatasnya fasilitas	• Peluang modernisasi kapal perikanan rakyat melalui bantuan pemerintah dan skema pembiayaan • Integrasi data kapal dan alat penangkap dengan sistem informasi pusat. • Kemitraan dengan BUMN dan swasta dalam pembangunan dan perawatan kapal • Edukasi dan pelatihan penggunaan alat tangkap selektif dan adaptif	• Peredaran kapal eks-asing dan alat tangkap ilegal. • Potensi konflik penggunaan ruang laut dengan sektor lainnya • Risiko keselamatan akibat cuaca ekstrem yang meningkat. • Fluktuasi harga bahan baku kapal dan alat tangkap • Ancaman manipulasi sistem pemantauan berbasis teknologi

efisiensi • Peningkatan pengawasan terhadap pendaftaran dan pengukuran ulang kapal	perawatan dan galangan kapal di wilayah terpencil	• Pengembangan teknologi tangkap yang efisien dan ramah lingkungan	
---	---	--	--

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Strengths (S)	Weaknesses (W)	Opportunities (O)	Threats (T)
• Tersedianya jaringan pelabuhan perikanan nasional yang tersebar di seluruh WPPNRI • Pelabuhan perikanan berfungsi sebagai simpul logistik, pusat pelayanan usaha, dan titik pengawasan • Beberapa pelabuhan telah ditetapkan sebagai lokasi implementasi PIT dan PNBP Pascaproduksi • Adanya kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan fungsi operasional pelabuhan	• Sebagian besar pelabuhan belum memenuhi standar sarana dan prasarana • Keterbatasan fasilitas pendukung seperti cold storage, air bersih, dan BBM nelayan • Sistem informasi logistik dan produksi belum terintegrasi nasional • Rendahnya pemanfaatan pelabuhan oleh kapal skala kecil • Kurangnya SDM pelabuhan dengan kompetensi digital dan manajemen modern	• Penerapan konsep Pelabuhan berbasis teknologi dan efisiensi layanan • Integrasi pelabuhan perikanan dengan jalur logistik nasional • Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi melalui APBN dan pinjaman dan hibah luar negeri • Kolaborasi pengelolaan pelabuhan dengan BUMN dan swasta • Transformasi pelabuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kelautan daerah	• Kerentanan pelabuhan terhadap abrasi, rob, dan perubahan iklim • Potensi konversi lahan pelabuhan untuk kepentingan non-perikanan • Rendahnya alokasi pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur pelabuhan • Kelebihan kapasitas saat musim puncak produksi ikan. • Ketimpangan pelayanan antar wilayah barat dan timur Indonesia.

Tersedianya regulasi terkait standar pelayanan minimal pelabuhan perikanan			
--	--	--	--

Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan

Strengths (S)	Weaknesses (W)	Opportunities (O)	Threats (T)
- Potensi sumber daya ikan yang besar dan beragam di seluruh perairan Indonesia - Kebijakan PIT memberikan kepastian berusaha berbasis kuota dan zonasi. - Adanya program industrialisasi perikanan untuk meningkatkan nilai tambah	- Sebagian besar usaha masih berskala kecil dan belum efisien secara ekonomi - Terbatasnya akses terhadap pasar, perbankan, dan informasi usaha - Kurangnya data usaha dan produksi aktual sebagai dasar perencanaan - Rendahnya pemanfaatan teknologi tangkap dan pasca-tangkap - Ketergantungan terhadap musim ikan dan BBM bersubsidi	- Transformasi rantai pasok berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi usaha - Pengembangan diversifikasi produk hasil tangkapan bernilai ekonomi tinggi - Peluang ekspor langsung melalui pelabuhan strategis - Pemanfaatan platform e-commerce untuk akses pasar domestik dan ekspor	- Fluktuasi harga ikan baik di pasar domestik maupun global - Ketidakstabilan pasokan akibat kondisi cuaca dan musim paceklik - Kenaikan biaya produksi akibat krisis energi dan logistik - Keterbatasan kapasitas manajerial pelaku usaha penangkapan

Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Strengths (S)	Weaknesses (W)	Opportunities (O)	Threats (T)
Tersedianya program perlindungan seperti asuransi	Rendahnya literasi digital dan finansial nelayan skala kecil	Transformasi kelembagaan nelayan menjadi entitas ekonomi	- Penurunan minat generasi muda menjadi nelayan - Krisis iklim dan

nelayan dan bantuan sarana produksi • Basis data nelayan melalui e-KUSUKA semakin terintegrasi • Kelembagaan nelayan lokal aktif dan berkembang • Adanya program prioritas seperti Kampung Nelayan Maju dan Merah Putih • Dukungan pelatihan teknis dan pemberdayaan dari pemerintah pusat dan daerah • Kelembagaan pelaku usaha mulai tumbuh melalui koperasi dan kelompok nelayan • Dukungan akses pembiayaan usaha melalui KUR sektor kelautan dan LPMUKP	• Ketimpangan akses pemberdayaan antar kelompok masyarakat nelayan • Belum optimalnya jangkauan program ke wilayah 3T • Minimnya partisipasi nelayan dalam perencanaan program • Ketergantungan terhadap program bantuan yang bersifat sementara	berbasis koperasi • Penguatan sistem layanan nelayan berbasis digital dan inklusif • Pendekatan pemberdayaan berbasis wilayah dan potensi lokal. • Kemitraan strategis dengan dunia usaha dan lembaga internasional • Regenerasi nelayan melalui wirausaha nelayan muda. • Pembentukan koperasi modern dan kemitraan dengan pelaku industri	bencana pesisir mengancam sumber penghidupan • Ketimpangan kesejahteraan antar wilayah pesisir. • Potensi konflik sosial akibat distribusi bantuan yang tidak merata • Stigmatisasi negatif terhadap profesi nelayan di masyarakat urban
--	---	--	---

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sebagai Kementerian yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

KKP berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan melalui tiga tujuan utama pembangunan (*ultimate goals*) yaitu: 1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru (*blue food*), pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta tiga tujuan utama pembangunan (*ultimate goals*), Visi KKP tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”.

2. Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita yaitu:



Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung tujuh dari delapan Asta Cita terutama Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **“Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”** yang melaksanakan **Asta Cita 8**;
2. **“Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”** yang melaksanakan **Asta Cita 2, 3, 5, dan 6**;
3. **“Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** yang melaksanakan **Asta Cita 4**; dan
4. **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”** yang melaksanakan **Asta Cita 7**.

3. Tujuan

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas.

4. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

1. SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut;
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional;
4. SS-4 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
5. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut”, dengan indikator kinerja:

1. Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau -

pulau kecil dari 30 Juta ha pada tahun 2025 menjadi 32,5 Juta ha pada tahun 2029;

2. Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut dari 1% pada tahun 2025 menjadi 70% pada tahun 2029; dan

Sasaran Strategis Kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, dengan indikator kinerja:

1. PDB perikanan dari Rp 595,06 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 718,98 triliun pada tahun 2029;
2. Volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;
3. Volume produksi garam dari 2,25 juta ton pada tahun 2025 menjadi 5,2 juta ton pada tahun 2029;
4. Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0-1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;
5. Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,6% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;
6. Indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan dari 76 pada tahun 2025 menjadi 83,8 pada tahun 2029; dan
7. Kelembagaan ekonomi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi dari 4 lembaga pada tahun 2025 menjadi 37 lembaga pada tahun 2029.

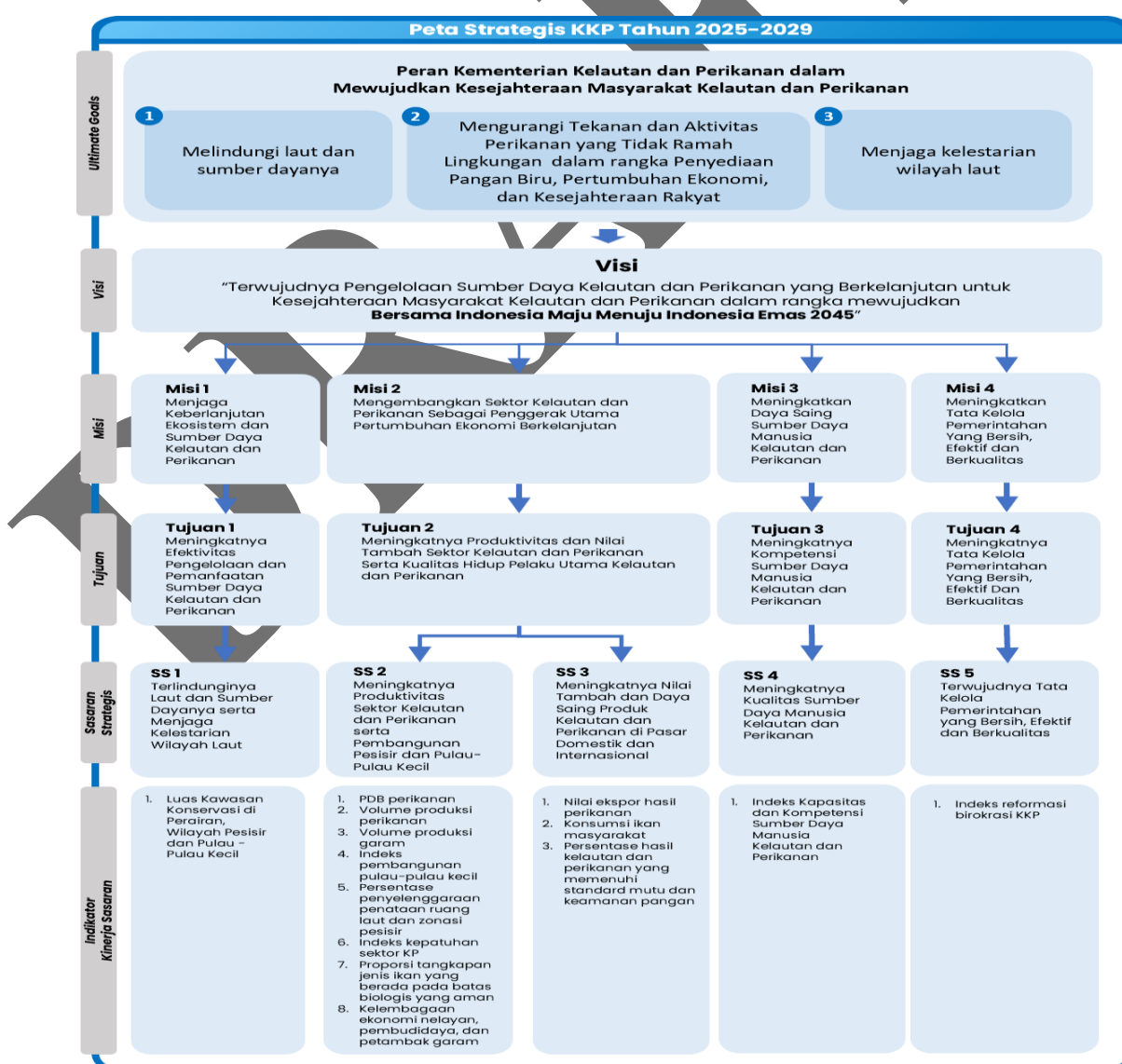
Sasaran Strategis Ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai ekspor hasil perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
2. Konsumsi ikan masyarakat dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan

- Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.

Sasaran Strategis Keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.

Sasaran Strategis Kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Berkualitas”, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.



Gambar 6. Peta Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

B. Pembagunan Perikanan Tangkap

1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Patisipatif, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Nelayan” untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

2. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

3. Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi DJPT, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

- a. Menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengawasan berbasis wilayah pengelolaan.
- b. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi, modernisasi armada, dan integrasi sistem logistik hasil tangkapan.
- c. Mengembangkan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai simpul layanan terpadu dan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan.
- d. Memperkuat kelembagaan, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan, termasuk nelayan kecil, perempuan, dan pemuda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing.
- e. Meningkatkan tata kelola perikanan tangkap yang transparan dan akuntabel, melalui penguatan regulasi, perizinan, pemantauan, serta sistem data dan informasi perikanan.

4. Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Sasaran program perikanan tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJPT sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan, SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas. Sasaran Program DJPT 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan nelayan meningkat dengan indikator Nilai Tukar Nelayan dengan target 105 pada tahun 2025 menjadi 109 pada tahun 2029.
- b. Meningkatnya produksi perikanan tangkap secara berkelanjutan dengan indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap dengan target 6,19 juta ton pada tahun 2025 menjadi 7,50 juta ton pada tahun 2029.
- c. Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan dengan indikator Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman dengan target ≤ 80 persen pada tahun 2025 hingga 2029.
- d. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel DJPT dengan indikator Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap dengan target nilai 86 pada tahun 2025 menjadi 88 pada tahun 2029.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dimana tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama Penguatan Transformasi. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dan Kesiambungan Pembangunan.

Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I

1



Transformasi Sosial

- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
- Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif

2



Transformasi Ekonomi

- Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan
- Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
- Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama
- Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia
- Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa

3



Transformasi Tata Kelola

- Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi
- Penyempurnaan fondasi penataan regulasi
- Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi
- Peningkatan kualitas ASN berbasis merit
- Kebijakan pembangunan berbasis bukti
- Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Peningkatan pelayanan public berbasis teknologi informasi
- Penguatan kapasitas masyarakat sipil

4



Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepimpinan Indonesia

- Pembaharuan substansi hukum
- Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila
- Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional
- Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai
- Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif
- Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan
- Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi
- Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri

5



Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat
- Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana
- Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup
- Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan
- Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK

6



Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

- Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi
- Pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa)
- Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital
- Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*)

7



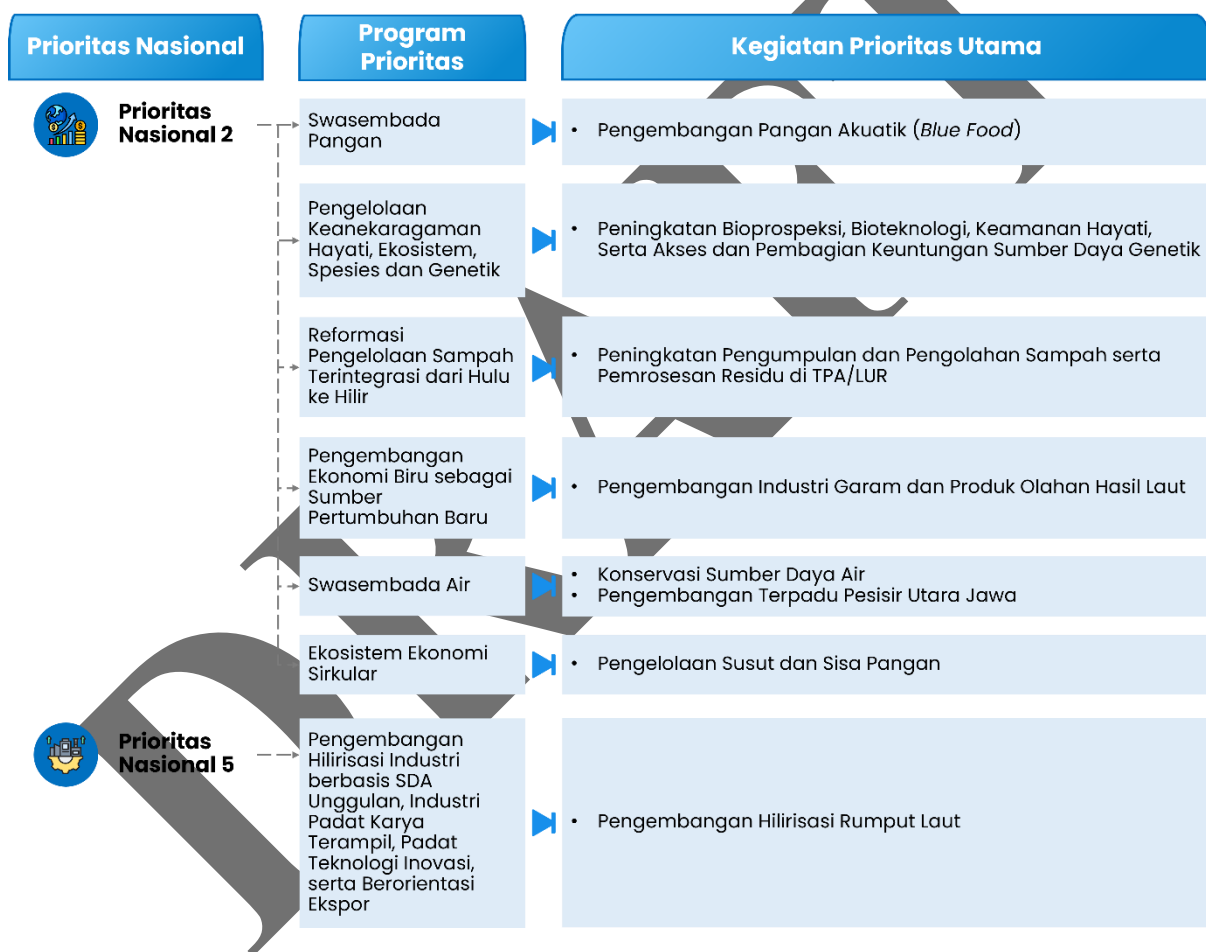
Kesinambungan Pembangunan

- Reformasi tata kelola fiskal
- Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah

Gambar 7. Fokus Arah Kebijakan RPJMN 2025–2029

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan penggabungan antara Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I. RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi Rencana Strategis KKP 2025-2029

KKP berkontribusi dalam pencapaian indikator sasaran kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 8. Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Utama terkait Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025-2029

Selain itu, KKP juga berkontribusi dalam pencapaian kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025-2029 pada Prioritas Nasional (Asta Cita) ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan. PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

KKP merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang melaksanakan PSN yaitu: 1) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan di Bali, 2) Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura dengan fokus area Jawa Barat, dan 3) Pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. Proyek Strategis Nasional 2025-2029 Terkait KKP

No	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Pelaksana
1	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	Bali	Kementerian Kelautan dan Perikanan
2	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	Jawa Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
3	Pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu	Maluku	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sumber: RPJMN 2025-2029

Dalam rangka mendukung PSN lainnya yaitu, 1) Program Hilirisasi Komoditas Rumput Laut, dan 2) Program Hilirisasi Garam melalui Proyek Pembangunan Soda Ash, KKP akan melakukan transformasi hulu untuk meningkatkan produksi rumput laut dan garam berkualitas secara berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan *mindset* bahwa pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Terdapat empat aspek yang melandasi kerangka pikir pembangunan ekonomi biru, yaitu:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai *Main System* Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang didorong untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional maka sektor kelautan dan perikanan harus menjadi *leading sector* yang harus mendapatkan sokongan oleh sektor lainnya dalam setiap konteks pembangunan nasional.

2. Ekologi Sebagai Panglima

Pembangunan kelautan dan perikanan memprioritaskan pada perlindungan laut untuk memberikan ruang hidup bagi sumber daya hayati yang ada di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Laut merupakan episentrum serapan karbon dunia yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim dan gas rumah kaca. Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki harus dioptimalkan secara berkelanjutan sehingga menjadi *champion* di pasar global.

3. Market Driven Oriented

Pembangunan kelautan dan perikanan harus dapat mudah beradaptasi terhadap tuntutan pasar domestik dan global sehingga daya saing kompetitif dan komparatif harus terus ditingkatkan.

4. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mengakses informasi secara akurat dan *real-time*, serta mendorong pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain: pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi satelit, serta teknologi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan kelautan dan perikanan memperhatikan 4 prinsip pembangunan yaitu; 1) **Tematik**, mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah; 2) **Holistik**, mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan; 3) **Integratif**, sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor, dan 4) **Spasial**, pengembangan kawasan berbasis daya dukung secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan 3 aspek keberlanjutan yaitu; sosial, lingkungan, dan ekonomi.



Gambar 9. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru

Maka, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 adalah: 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut; 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; 3) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan; 4) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik, pemerintah telah mengidentifikasi lima arah kebijakan pengarusutamaan yang bersifat inovatif dan adaptif. Kelima arah kebijakan ini saling terkait dan bertujuan untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan serta menjadi landasan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Gender dan Inklusi Sosial

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 43 tahun 2023 tentang Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG, agar setiap unit organisasi dapat menyusun perencanaan yang responsif gender melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup :

- a. Penguatan tujuh PUG, yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. Penyiapan roadmap PUG;

- d. Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit kerja Eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. Pembuatan profil gender;
- f. Keberpihakan pemenuhan hak anak dan kaum rentan kelautan dan perikanan; dan
- g. monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan/*goal*, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar dimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya :

- a. Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. Meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan pengendalian terhadap perubahan iklim;
- c. Mengelola dan melindungi ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- d. Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. Melestarikan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- g. Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan

- k. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam The United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

KKP juga mendukung pencapaian target TPB nomor 1 "Tanpa Kemiskinan" (*No Poverty*), nomor 2 "Tanpa Kelaparan" (*Zero Hunger*), nomor 7 "Energi Bersih dan Terjangkau" (*Affordable and Clean Energy*), nomor 8 "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" (*Decent Work and Economic Growth*), nomor 9 "Industri, Inovasi, dan Infrastruktur" (*Industry Innovation and Infrastructure*), nomor 12 "Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab" (*Responsible Consumption and Production*), nomor 13 "Penanganan Perubahan Iklim" (*Climate Action*), dan nomor 17 "Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan" (*Partnership for the Goals*).

3. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (*on-line*), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan pendekatan yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, yakni dengan memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Indonesia telah menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang memberikan nilai ekonomi terhadap setiap unit emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan implementasi di berbagai

sektor, termasuk sektor kelautan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan Permen tersebut, penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dilakukan melalui mekanisme Perdagangan Karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja. Adapun lingkup dari penyelenggaraan NEK di sektor kelautan antara lain adalah pengelolaan karbon biru; penangkapan ikan; pembudidayaan ikan; pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan kegiatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan untuk mendukung aktivitas pembangunan yang rendah emisi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah dan non-pemerintah. Keterlibatan pihak non-pemerintah terus didorong melalui inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan, serta investasi hijau yang berkelanjutan.

Pembangunan rendah karbon merupakan pendekatan yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, yakni dengan memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Indonesia telah menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang memberikan nilai ekonomi terhadap setiap unit emisi GRK, dengan implementasi di berbagai sektor, termasuk sektor kelautan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan Permen tersebut, penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dilakukan melalui mekanisme Perdagangan Karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja. Adapun lingkup dari penyelenggaraan NEK di sektor kelautan antara lain adalah pengelolaan karbon biru, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan kegiatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim menjadi strategi utama untuk menekan potensi penurunan Pendapatan Domestik Bruto. Dampak perubahan

iklim yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif panjang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, penurunan hasil tangkapan nelayan, kehilangan mata pencaharian, serta serangan penyakit sensitif iklim. Implementasi pembangunan berketahanan iklim mendorong *multistakeholder* untuk peningkatan infrastruktur berketahanan iklim, penerapan teknologi, peningkatan tata kelola dan pendanaan iklim, serta peningkatan kapasitas pada masyarakat dan pemerintah.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

PIT, Modernisasi, Pelabuhan

D. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi pembangunan perikanan tangkap tahun 2025–2029 difokuskan pada penyempurnaan sistem hukum dan kebijakan untuk mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), optimalisasi penerimaan negara, serta transformasi tata kelola usaha penangkapan ikan dan pelabuhan perikanan. Regulasi-regulasi ini disusun untuk meningkatkan kepastian hukum, efisiensi perizinan, keadilan dalam pemanfaatan sumber daya ikan, serta efektivitas pengawasan dan pelaporan berbasis data. Dalam periode ini, arah pembaruan regulasi tidak hanya menyasar aspek teknis operasional, tetapi juga menyentuh dimensi fiskal, kelembagaan, dan digitalisasi pelayanan publik.

Sejumlah regulasi prioritas akan direvisi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk mengakomodasi skema perizinan PIT berbasis kuota dan zona, serta Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 terkait tarif PNBP yang perlu disesuaikan dengan prinsip produktivitas dan keadilan. Revisi juga mencakup Permen KP Nomor 1 dan 2 Tahun 2023 yang mengatur nilai produksi ikan dan tata cara pengenaan tarif PNBP, serta Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan teknis kebijakan PIT. Di samping itu, akan disusun regulasi baru seperti Permen KP tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, Permen KP tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, serta Keputusan Menteri dan Keputusan Dirjen yang mendukung

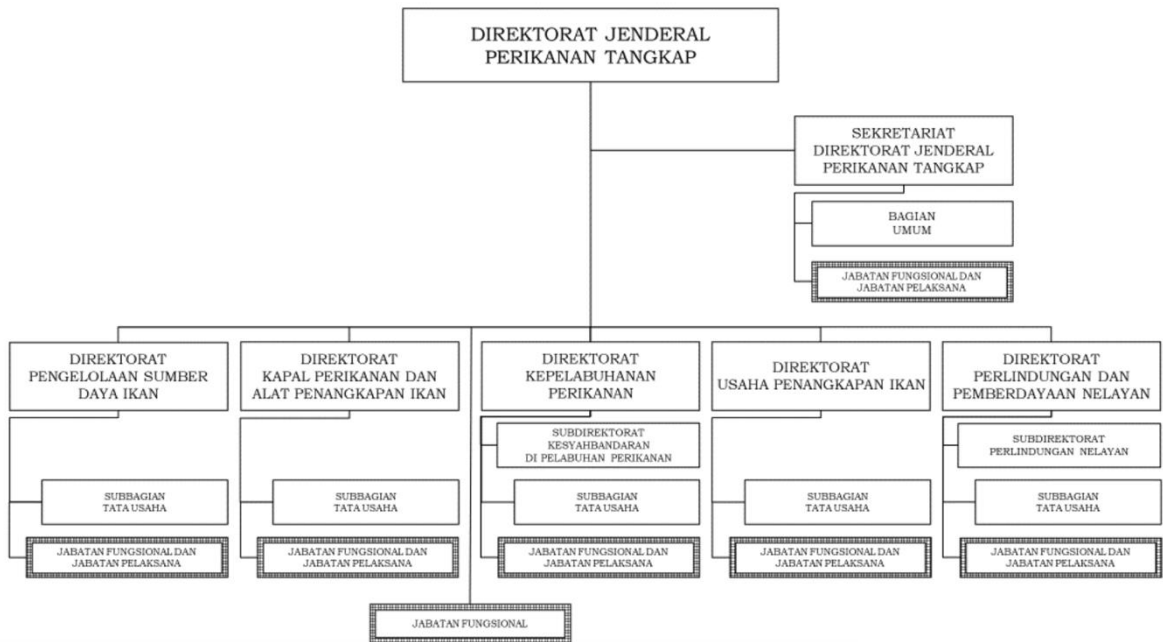
pelaksanaan PIT, pengelolaan kuota, serta klasifikasi dan wilayah kerja pelabuhan perikanan.

Dengan kerangka regulasi yang diperkuat dan disesuaikan secara menyeluruh, pembangunan perikanan tangkap diharapkan mampu berjalan secara terukur, transparan, dan efisien. Harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan teknis ini juga menjadi fondasi penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, serta memperkuat peran negara dalam menjamin kesejahteraan nelayan dan pelaku utama perikanan secara adil dan berkelanjutan. Secara rinci, rencana kerangka regulasi di lingkup DJPT selama periode 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Matrik Kerangka Regulasi

E. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan pembangunan perikanan tangkap 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat struktur organisasi, peran unit pelaksana teknis, serta sinergi antar pemangku kepentingan guna mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, produktif, dan terukur. Reformasi kelembagaan dilakukan untuk menjawab kebutuhan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan, serta penyediaan layanan publik yang responsif, digital, dan berbasis kinerja. Penguatan kelembagaan Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kelembagaan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk pergeseran paradigma dari orientasi produksi menuju keberlanjutan, serta penyesuaian terhadap mandat yang diberikan, baik secara konstitusional, teknis, pembangunan, maupun organisasi. Selain itu, kerangka kelembagaan juga disusun dengan memperhatikan dinamika kebijakan pembangunan nasional, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta regulasi sektoral yang berlaku, dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran (*right sizing*), kesatuan fungsi (*unified function*), efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan. Reformasi kelembagaan ini turut diperkuat dengan peningkatan tata laksana dan kapasitas sumber daya aparatur agar selaras dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan operasional di lapangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Struktur organisasi Ditjen Perikanan Tangkap sebagaimana ditampilkan pada Gambar 10.



Gambar 10. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program DJPT yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana tersaji berikut.

Tabel 4. Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

SASARAN/INDIKATOR		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program: Kesejahteraan nelayan meningkat						
1	Indikator Kinerja: Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	105	106	107	108	109
a	Indikator Kegiatan: Pengelolaan Kenelayanan yang berdaya saing					
Sasaran Program: Meningkatnya produksi perikanan tangkap secara berkelanjutan						
1	Indikator Kinerja: Volume Produksi Perikanan Tangkap (Juta Ton)	6,19	6,47	6,84	7,22	7,50
a	Indikator Kegiatan: Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan					
b	Indikator Kegiatan: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang optimal dan bertanggung jawab					
c	Indikator Kegiatan: Pengelolaan Perizinan bertanggung jawab dan sesuai ketentuan					
Sasaran Program: Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan						
1	Indikator Kinerja: Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman (%)	≤80	≤80	≤80	≤80	≤80
a	Indikator Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan					
Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel DJPT						
1	Indikator Kinerja: Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86,0	86,5	87,0	87,5	88,0
a	Indikator Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup Ditjen Perikanan Tangkap					

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja eselon II.

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi kuotanya (persen)	100	100	100	100	100
		2	Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan log book penangkapan ikan (persen)	71	75	80	85	89
		3	Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (nilai)	86	86,5	87	87,5	88
		4	Persentase hari layar pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Persen)	100	100	100	100	100
		5	Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan (persen)	100	100	100	100	100
		6	Persentase posisi/rekomendasi /prakarsa Indonesia	100	100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
			di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional (Persen)					
		7	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	80	81	82	83	84
		8	Persentase harvest strategy di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun (Persen)	76	77	78	79	80
		9	Persentase pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan (Persen)	81	82	83	84	85
		10	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	83	84	85	86	87
		11	Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat (Persen)	100	100	100	100	100
		12	Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun (Persen)	100	100	100	100	100

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan	1	Persentase pemenuhan dokumen awak kapal perikanan (persen)	13	15	17	20	22
		2	Petugas pemeriksaan kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)	120	130	140	150	160
		3	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3	3	3	3	3
		4	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100	100	100
		5	Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	92	93	94	95	96
		6	Petugas ahli ukur kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)	30	30	30	30	30
		7	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	11.000	20.000	25.000	30.000	35.000
		8	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1	1	1	1	1
		9	Persentase awak kapal perikanan yang terlindungi (persen)	10	11	12	13	14
		10	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		11	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang optimal dan bertanggung jawab	1	Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (persen)	78	79	80	81	82
		2	Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (persen)	79	80	81	82	83
		3	Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (persen)	49	50	51	52	53
		4	Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Fish Market bertaraf internasional (persen)	100	100	100	100	100
		5	Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan Pelabuhan Perikanan yang menerapkan konsep Eco Fishing Port (persen)	100	100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		6	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (dokumen)	4	4	4	4	4
		7	Persentase Pelabuhan Perikanan dengan tingkat operasional optimum (persen)	29	30	31	32	33
		8	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (persen)	79	80	81	82	83
		9	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (persen)	37	39	41	43	45
		10	Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (persen)	41	43	45	47	49
		11	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	6,1	7,1	8	9	10
		12	Persentase pembangunan Pelabuhan Perikanan SKPT (persen)	95	96	97	98	99
		13	Tingkat Penerapan PIT dan PNPB Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (nilai)	90	91	92	93	94
		14	Persentase Pelabuhan Perikanan dengan tingkat kinerja baik	16	17	18	19	20

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
			(persen)					
		15	Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi (pelabuhan)	100	110	120	125	127

Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengelolaan Perizinan bertanggung jawab dan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
		2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan (dokumen)	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
		3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	91	92	93	94	95
		4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (nilai)	3	3,3	3,5	3,7	3,9

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	91	92	93	94	95
		6	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	96	97	98	99	100
		7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100	100	100	100	100

Tabel 9. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengelolaan Kenelayanan yang berdaya saing	1	Persentase kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	45	50	55	60	65
		2	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
			program sertifikasi tanah nelayan (orang)					
		3	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100	100	100	100	100
		4	Kampung Nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (lokasi)	100	500	500	-	-
		5	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)	100	100	100	100	100

Tabel 10. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	81,5	81,75	82	82,25	82,5
		2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	84	84,5	85	85,5	86
		3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	88	88,2	88,4	88,6	88,8
		4	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap	81	82	83	84	85
		5	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap	76	77	78	79	80
		7	Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap	81	82	83	84	85
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap	90	90	90	90	90
		9	Persentase Pelaksanaan Kerja sama bidang Perikanan Tangkap	82	83	84	85	86
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	85	86	87	88	89
		11	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
		12	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap	88,5	88,8	89	89,3	89,5
		13	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap	100	100	100	100	100
		14	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap	100	100	100	100	100
		15	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	100	100	100	100	100
		16	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen	77	78	79	80	81

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Perikanan Tangkap					
	17	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap	80	81	82	83	84
	18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	92	92,1	92,15	92,2	92,25
	19	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap	91	92	93	94	95
	20	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap	80	81	82	83	84
	21	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap	65	66	67	68	69

C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan tangkap serta mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari berbagai pihak, termasuk pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non-perbankan, masyarakat, serta dunia usaha.

Pemerintah menyadari adanya keterbatasan fiskal, di mana menurut RPJMN 2025–2029, APBN hanya mampu membiayai sekitar 30% dari total kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendanaan yang bersifat kolaboratif dan inovatif di luar APBN, yang bersumber dari pemerintah asing, sektor swasta, lembaga keuangan, lembaga donor, dan mitra pembangunan lainnya yang sah dan legal.

Pendanaan yang bersumber dari APBN Ditjen Perikanan Tangkap akan difokuskan pada pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, penguatan regulasi dan penataan perizinan, pemberdayaan pelaku utama, serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang bergantung pada

sektor perikanan tangkap. Di sisi lain, penguatan sinergi pendanaan dengan kementerian/lembaga terkait serta dengan pemerintah daerah melalui APBD juga terus dilakukan.

Dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, kerja sama, persatuan, dan kerukunan sebagai rumus keberhasilan suatu bangsa. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong inovasi pembiayaan yang kreatif, kolaboratif, dan inklusif sebagai solusi atas keterbatasan fiskal, khususnya dalam mengimplementasikan ekonomi biru secara berkelanjutan di Indonesia.

Pengembangan skema pembiayaan inovatif dan kolaboratif (*innovative and collaborative financing*) menjadi strategi utama dalam menarik berbagai sumber pendanaan legal untuk terlibat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Skema ini mencakup beragam instrumen seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), *Grant Budget Support Aids*, Kreditur Swasta Asing (KSA), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pembiayaan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta berbagai instrumen tematik seperti *Blue Bond*, *Coral Bond*, *SDGs Bond*, hingga *Samurai Bond*. Selain itu, pendanaan juga dapat bersumber dari dana hibah (lembaga donor, LSM, CSR, filantropi), *Debt for Nature Swaps*, *Blended Finance*, *Blue/Green Finance*, *Crowdfunding*, *Trust Fund*, *Impact Investing*, serta operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dan kredit perbankan atau lembaga dana bergulir lainnya.

Secara terinci, kerangka pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN menurut program dan kegiatan dituangkan dalam matriks kerangka pendanaan sebagai dasar implementasi kegiatan prioritas di bidang perikanan tangkap.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (renstra) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DJPT, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra DJPT Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran Sekretariat dan Direktorat Teknis serta berbagai sektor terkait lainnya, masyarakat juga termasuk seluruh stakeholders perikanan tangkap. Kerja keras dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tertuang dalam rencana strategis ini.

MATRIKS KERANGKA REGULASI

USULAN MATRIK KERANGKA REGULASI DITJEN PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025-2029

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Revisi PP No. 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Menyesuaikan perizinan dengan skema PIT berbasis zona dan kuota	Biro Hukum KKP	Ditjen PT, DJPRL, Sekjen KKP	2025	Harmonisasi dengan UU Cipta Kerja
2	Revisi PP No. 85/2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP di KKP	Menyesuaikan tarif PNBP berbasis pascaproduksi dan asas keadilan	Biro Keuangan KKP	Ditjen PT, DJPB, DJPRL	2025	Mendukung implementasi PIT
3	Revisi Permen KP No. 1/2023	Penyesuaian tata cara penetapan nilai produksi untuk dasar PNBP pascaproduksi	Ditjen PT	DJPB, Biro Keuangan	2025	Penajaman indikator nilai produksi ikan
4	Revisi Permen KP No. 2/2023	Penyempurnaan persyaratan tarif dan objek PNBP berdasarkan realisasi produksi	Ditjen PT	DJPB, DJPRL	2025	Sinergi dengan revisi PP 85/2021
5	Revisi Permen KP No. 28/2023	Penguatan regulasi PIT terutama terkait kuota, distribusi zona, dan pelabuhan pangkalan	Ditjen PT	DJPRL, Biro Hukum	2025	Dasar operasional PIT
6	Rancangan Permen KP tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan	Menjamin legalitas dan keberlanjutan hasil tangkapan untuk akses pasar	Ditjen PT	DJPRL, BP2MHKP, DJPDS	2026	Mendukung ketertelusuran dan ekspor
7	Rancangan Permen KP tentang Kesyahbandaran Perikanan	Memperjelas fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	Ditjen PT	Ditjen Hubla, Pemda	2026	Menjamin keselamatan kapal perikanan
8	Reviu Kepmen KP No. 187/2023	Penyesuaian pelabuhan pangkalan sesuai zona PIT dan kesiapan infrastruktur	Ditjen PT	DJPRL, Pemda	2025	Dasar distribusi kuota dan pengawasan
9	Kepmen KP tentang Kuota Penangkapan Ikan	Menetapkan alokasi kuota per WPP, jenis ikan, dan kelompok pengguna	Ditjen PT	BRIN, BPS, DJPRL	2025	Kunci pengendalian PIT

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
10	Kepmen KP tentang Kuota Industri dan Kuota Nelayan Lokal	Menjamin proporsionalitas kuota dan keberpihakan pada nelayan kecil	Ditjen PT	Pemda, Koperasi, BRIN	2025	Komitmen keadilan distribusi kuota
11	Kepmen KP tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan	Dasar evaluasi kinerja kapal dan penetapan kuota kapal	Ditjen PT	BPS, BRIN	2025	Dukung efisiensi armada
12	Kepdirjen PT tentang Verifikasi Data Kuota	Menjamin akurasi pemanfaatan kuota dan kontrol operasional	Ditjen PT	BPS, DJPB	2025	Mendukung pelaporan PIT
13	Kepdirjen PT tentang Analisis Data Logbook	Memastikan validasi dan analisis hasil tangkapan secara digital	Ditjen PT	Pusdatin, BRIN	2025	Dasar evaluasi kebijakan PIT
14	Kepmen KP tentang Wilayah Kerja Pelabuhan	Penataan wilayah kerja pelabuhan agar tidak tumpang tindih dan efisien	Ditjen PT	Pemda, DJPRL	2026	Dasar klasifikasi pelabuhan
15	Kepmen KP tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan	Klasifikasi pelabuhan berdasarkan kapasitas dan fungsi	Ditjen PT	DJPRL, Bappenas	2026	Dukung pembangunan pelabuhan terintegrasi

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN

DRAFT